

RINGKASAN RKPD

KABUPATEN MAMUJU TENGAH
TAHUN 2021

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH



RINGKASAN EKSEKUTIF

Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2005-2025 yang dijabarkan ke dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2021, untuk selanjutnya menjadi acuan perencanaan tahunan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Pandemi Covid-19 yang merebak saat ini menjadi pukulan bagi perekonomian Indonesia secara umum akan menjadi tantangan tersendiri karena tentu akan berpengaruh terhadap kehidupan sosial dan ekonomi.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Mamuju Tengah tahun 2021 mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mamuju Tengah dengan visi “Terwujudnya Kemandirian Daerah dalam Bingkai Lalla Tassi’sara melalui Gerakan Bersama Membangun Mamuju Tengah untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat 2021”. RKPD Mamuju Tengah tahun 2021 merupakan penjabaran tahun ke lima dalam rencana pembangunan lima tahunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah 2016- 2021 dengan mengusung arah kebijakan **“Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pemulihan Ekonomi Dampak Covid-19”** yang diprioritaskan pada penguatan kapasitas penanganan gangguan K3 dan konflik sosial, penguatan ketahanan pangan daerah, dan penataan ruang dan pengelolaan lingkungan prioritas ini juga untuk menyikapi dampak pasca pandemi Covid-19 yang akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi.

PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2021



Penguatan Kapasitas Penanganan
Gangguan K3 dan Konflik Sosial



Penguatan Ketahanan Pangan Daerah



Penataan Ruang dan Pengelolaan
Lingkungan



Pemulihan Ekonomi

STRATEGI PRIORITAS PEMBANGUNAN

1. Kemandirian dan Ketahanan pangan lokal

Di Kabupaten Mamuju Tengah isu ketahanan pangan juga merupakan bahan pembicaraan yang cukup mengemuka di hadapan masyarakat. Kekhawatiran Mamuju tengah ke depan dalam mengalami krisis pangan atas akibat berkurangnya lahan pangan. Di sisi lain pola Konsumsi pangan non beras belum memasyarakat serta mengembalikan pola konsumsi pangan lokal masyarakat yang telah dikonsumsi terdahulu sehingga sampai saat ini diversifikasi pangan non beras di masyarakat implementasinya belum ada, seperti penanaman umbi-umbian dan bahan pangan lokal lainnya misal sagu dan pisang.

2. Pembangunan Kota Topoyo-Tobadak dan Konektivitas Antar Wilayah

Berkembangnya kota terpadu Mandiri Tobadak yang beriringnya dengan perkembangan kota Topoyo, menjadikan Topoyo dan Tobadak kota kembar dalam satu kesatuan sistem kota. Perkembangan kota ini akan mempengaruhi tatanan kehidupan masyarakat setempat maupun para calon investor yang akan mengadu nasib di Mamuju Tengah khususnya di Topoyo dan Tobadak. Demikian rencana koneksi jaringan jalan, jembatan, kereta api dan tata air akan memberikan pengaruh penataan ruang pada dimensi-dimensi turunan berikutnya.

3. Mamuju Tengah sebagai daerah maritim.

Dengan panjang pantai kurang lebih 150 Km mulai dari Pantai Pangale-Budong-Budong-Topoyo dan Karossa, daerah ini menyimpan daya tarik yang luar biasa. Daya tarik terhadap Sumber daya alam perikanan tangkap dan budidaya, ikan, udang dan rumput laut dapat digunakan sebagai penopang sistem ketahanan pangan di Mamuju Tengah dan sekitarnya. Sumber daya Migas di sepanjang pantai Mamuju Tengah merupakan potensi yang tidak bisa dinafikan dengan keberadaan Blok Budong-Budong dan Blok Kuma. Potensi Wisata laut dan pulau membuat ketertarikan dan potensi penerimaan sumber-sumber pendapatan daerah. Demikian keberadaan Pelabuhan Budong-Budong dan pelabuhan rakyat sepanjang pantai Barat Mamuju Tengah sebagai penunjang kebijakan toll laut dan alur perhubungan ALKI II. Kondisi ini ke depan akan mempengaruhi.

4. Kemandirian energi.

Kondisi rasio elektrifikasi sebesar 52,34 % (sumber :PLN area Mamuju), berarti masyarakat Mamuju Tengah masih banyak yang belum menikmati akses listrik yang memadai. Daerah daerah Pangale, Budong-Budong (pantai), Tobadak, Karossa,

Topoyo (Salolebo), masih banyak yang belum menikmati fasilitas listrik. Tetapi di sisi lain potensi sumber daya energi listrik masih banyak dan sangat memungkinkan untuk dikembangkan. PLTMH jalur Sungai Budong-Budong dan Sungai Salolebo, PLTS hampir di semua tempat, PLTB di daerah pantai dan PLTA di daerah Batu Makodo (Sungai Budong_budong), Salolisu (Sungai Lisu) dan Kuroballo (Sungai Benggaulu) sangat potensial dikembangkan. Demikian pula potensi energi baru terbarukan dengan pemanfaatan limbah kotoran sapi ataupun limbah sawit sangat potensial di kabupaten Mamuju Tengah ini. Kondisi ini akan mempengaruhi perkembangan kemajuan daerah dan tatanan kehidupan masyarakat di masa depan

5. Perkembangan Penduduk.

Kabupaten Mamuju Tengah merupakan daerah percampuran dengan kata lain merupakan Indonesia mini. Daerah ini merupakan daerah tujuan transmigrasi dan tujuan mencari kehidupan atas alasan ekonomi. Penduduk yang besar dan cukup merupakan modal dasar pembangunan, apalagi dengan kalau ditunjang dengan kualitas sumber daya yang berkualitas. Tetapi apabila tanpa kualitas sumber daya manusia justru sebagai beban pemerintah maupun masyarakat, seperti tumbuhnya pengangguran, kemiskinan dan kerawanan sosial.

6. Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Pengelolaan lingkungan hidup diantaranya pengelolaan sampah, perambahan kawasan hutan, kebutuhan air bersih masyarakat, pencemaran status mutu air, pencemaran status mutu udara, penegakan hukum lingkungan, penanganan rehabilitasi hutan dan ladang, serta pengelolaan kerusakan kawasan hutan.

STRATEGI PENURUNAN KEMISKINAN

Kebijakan Pemerintah Difokuskan pada 3 kluster:

- 1. Kluster Pertama: Program bantuan dan perlindungan sosial terpadu berbasis keluarga,** yang bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin, dan perbaikan kualitas hidup keluarga miskin. Program utamanya adalah Beras Miskin (Raskin), Jamkesmas, Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan Bantuan Siswa Miskin (BSM).
- 2. Kluster Kedua: Program Penanggulangan kemiskinan berbasis Pemberdayaan Masyarakat** yang bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok Masyarakat miskin untuk terlibat dalam Pembangunan, meningkatkan pendapatan dan taraf hidup Masyarakat melalui usaha dan bekerja bersama untuk mencapai keberdayaan dan kemandirian dengan sasaran kelompok Masyarakat/kecamatan miskin. Dalam rangka itu, Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah komitmen untuk memberikan bantuan, fasilitasi dan pemberdayaan kepada kelompok difabel, kelompok-kelompok buruh tani, Nelayan dan kelompok lainnya yang berpenghasilan rendah.
- 3. Kluster Ketiga: Program penanggulangan kemiskinan berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi mikro dan kecil (UMK)** yang bertujuan untuk membuka dan memberikan akses permodalan dan penguatan Ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil dengan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Di Kabupaten Mamuju Tengah, Pemerintah Daerah komitmen untuk melaksanakan Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional Dan Toko Modern di Kabupaten Mamuju Tengah, untuk memberikan perlindungan kepada pengusaha kecil Tradisional di Mamuju Tengah untuk tumbuh, dan melakukan penataan dan modernisasi pasar tradisional

STRATEGI MENGURANGI PENANGGURAN

Kebijakan Pemerintah Difokuskan pada 6 kluster:

- 1. Pengembangan Informasi Pasar Kerja (labor market information),** yang dikemas dalam kegiatan Job Fair ataupun Pameran pembangunan yang dilaksanakan secara berkala setiap tahun sekali, baik dilaksanakan sendiri ataupun bergabung dengan kegiatan Provinsi. Berbagai perusahaan dapat diundang dan bergabung dalam kegiatan ini yang harapannya dapat menyediakan lowongan kerja.
- 2. Pelatihan Kerja.** Pelatihan bertujuan untuk menyediakan tenaga kerja yang lebih terampil, berpendidikan lebih tinggi dan fleksibel sesuai dengan kebutuhan pasar kerja serta meningkatkan produktivitas tenaga kerja agar hasil kerja atau produksi dapat bersaing dipasar global. Pelatihan ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan dan kualitas iklim kerja yang lebih baik dari tenaga kerja yang bersangkutan. Pada Tahun 2018, pelatihan lebih diarahkan kepada kebutuhan pasar dan dilaksanakan secara terpadu, melalui dukungan lintas SKPD sesuai dengan leading sektor masing-masing.
- 3. Pengembangan dan bimbingan usaha secara mandiri.** Strategi ini merupakan upaya untuk mengurangi pengangguran khususnya di pedesaan melalui pembentukan kelompok-kelompok usaha kecil dengan fasilitasi dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa serta Dinas Koperasi dan UMKM, Perindustrian, Perdagangan, dan Pertambangan. Kelompok-kelompok usaha ini dibimbing dan difasilitasi baik dari segi keterampilan berwirausaha, pendanaan, manajemen usaha, sampai dengan pemasaran dari produk atau jasa yang dihasilkan. Selanjutnya kelompok usaha mandiri yang sudah dapat berdiri sendiri dan mapan, dapat secara bergantian dan berantai memfasilitasi kelompok usaha baru lainnya, maka upaya ini akan dapat menyerap banyak tenaga kerja baru. –RKPD– 221 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH Ta.2021
- 4. Pengembangan usaha informal keluarga,** yang dikoordinasikan terutama oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga. Upaya ini dapat dilakukan dengan mendorong para pencari kerja terdidik untuk melanjutkan usaha informal dilingkungan keluarganya. Dengan memberi bekal tambahan latihan ketrampilan berwirausaha, mereka akan dapat mengembangkan, memodernisasi dan menjalankan usaha informal keluarganya dengan baik. Pengembangan usaha informal keluarga diarahkan untuk dapat memanfaatkan potensi daerah setempat dan diarahkan untuk mampu menyerap jumlah tenaga kerja yang lebih banyak. Dengan demikian mereka tidak memasuki pasar kerja, tetapi justru mereka akan dapat menciptakan dan memperluas kesempatan kerja baik bagi dirinya sendiri, keluarganya maupun orang-orang lain di sekitarnya.
- 5. Pengiriman tenaga kerja Indonesia ke luar negeri.** Upaya ini juga ditujukan untuk mengurangi jumlah pengangguran yang ada, karena terbatasnya lapangan kerja di dalam negeri. Penempatan tenaga kerja ke luar negeri lebih diprioritaskan bagi tenaga kerja profesional, mempunyai kualifikasi keterampilan dan pendidikan yang sesuai dengan tuntutan tugas yang ada di luar negeri. Dengan demikian, tidak diperkenankan melakukan kegiatan penempatan tenaga kerja keluar Negeri secara membabi buta, tanpa memperhatikan kualifikasi calon tenaga kerja yang bersangkutan.
- 6. Pengembangan usaha agrobisnis di pedesaan.** Upaya ini juga ditujukan untuk mengurangi pengangguran yang diarahkan untuk Masyarakat pedesaan. Terbatasnya lahan pertanian di pedesaan dan jenis pekerjaan sektor pertanian yang hanya bersifat musiman, merupakan kontribusi tersebar penyebab munculnya pengangguran tidak kentara (setengah pengangguran) di pedesaan.

**PROYEKSI INDIKATOR MAKRO EKONOMI
DAN SOSIAL TAHUN 2020-2021**

No	Indikator	Capaian 2019	Proyeksi 2020	Target RPJMD 2021	Proyeksi 2021
1	Pertumbuhan Ekonomi	5,62	4,22-4,5	7,94	4,5-5,5
2	PDRB Per Kapita (Juta Rupiah)	23,54	23-24,04	31,14	23,5 -25
3	Inflasi (%)	1,43	3,5	3,5	3,5
4	Tingkat Kemiskinan (%)	6,87	6,7-7,-07	6,51	6,51-6,97
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,67	2,72	2,66	2,66
6	Indeks Pembangunan Manusia	65,10	64,72	64,91	64,91

**PROYEKSI KAPASITAS KEUANGAN
DAERAH TAHUN 2020-2021**

Proyeksi Pendapatan Tahun 2021

No	Uraian	Proyeksi Tahun 2021 (n)
1	Pendapatan	653.673.248.194,43
1.1	Pendapatan Asli Daerah	22.318.658.976,40
1.1.1	Pajak Daerah	8.470.891.393,24
1.1.2	Retribusi Daerah	10.330.601.784,16
1.1.3	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipisahkan	330.000.000,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	3.187.165.799,00
1.2	Pendapatan Transfer	606.661.507.273,68
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	593.694.874.000,00
1.2.2	Transfer Antar Daerah	12.966.633.273,68
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	24.693.081.944,35
1.3.1	Hibah	0
1.3.2	Dana Darurat	0
1.3.3	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	24.693.081.944,35

Proyeksi Belanja Tahun 2021

No	Uraian	Proyeksi Tahun 2021
2	Belanja	621.814.965.518,43
2.1	Belanja Operasi	444.666.809.890,27
2.1.1	Belanja Pegawai	162.984.505.774,74
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	263.066.121.999,53
2.1.3	Belanja Bunga	8.045.391.716,00

2.1.4	Belanja Subsidi	0
2.1.5	Belanja hibah	9.383.745.000,00
2.1.6	Belanja Bansos	1.187.045.400,00
2.2	Belanja Modal	83.558.878.128,16
2.3	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00
2.4	Belanja Transfer	89.589.277.500,00
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	0
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	89.589.277.500,00

Proyeksi Pembiayaan Tahun 2021

No	Uraian	Proyeksi Tahun 2021
3.1	Penerimaan pembiayaan	11.000.000.000
3.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)	2.000.000.000
3.1.2	Pencairan dana cadangan	-
3.1.3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	-
3.1.4	Penerimaan pinjaman daerah	9.000.000.000
3.1.5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	11.000.000.000
3.1.6	Penerimaan piutang daerah	42.858.282.676
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-
3.2	Pengeluaran pembiayaan	1.000.000.000
3.2.1	Pembentukan dana cadangan	41.858.282.676
3.2.2	Penyertaan modal (investasi) daerah	11.000.000.000
3.2.3	Pembayaran pokok utang	42.858.282.676
3.2.4	Pemberian pinjaman daerah	-
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	42.858.282.676
	JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO	(30.480.178.942)

RENCANA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN TAHUN 2021

No	Urusan	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan	Jumlah Pagu	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		RKPD 2021	RKPD 2021	RKPD 2021	RKPD 2021	
1	2	3	4	5	6	7
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	3	13	34	30.658.487.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	5	18	57	70.731.355.214	DINAS KESEHATAN
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	2	8	27	23.538.951.696	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	11	23	76	213.680.856.174	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	4	17	44	8.338.558.500	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	3	9	15	4.805.599.711	DINAS KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	2	12	47	3.985.500.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
8	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	7	13	26	1.517.380.489	DINAS SOSIAL
9	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	4	4	6	184.398.790	DINAS TRANSMIGRASI
10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	5	6	7	264.072.018	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	4	13	38	2.812.368.186	DINAS KETAHANAN PANGAN
12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	3	3	4	4.050.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	5	11	30	3.310.464.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	4	11	23	1.171.224.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	4	10	32	3.902.820.282	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
1	2	3	6	9	12	21
16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	4	12	33	4.473.075.960	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	3	9	26	2.043.913.771	DINAS PERHUBUNGAN

18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	3	8	21	1.322.495.340	DINAS PERSANDIAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2	2	3	459.711.800	DINAS PENANAMAN MODAL , PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	5	10	17	1.045.960.741	DINAS PENANAMAN MODAL , PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2	3	3	338.399.543	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	1	1	1	24.681.750	DINAS PERSANDIAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	1	1	1	57.622.890	DINAS PERSANDIAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	1	1	1	140.800.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	2	9	21	763.618.873	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	1	2	2	107.949.042	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	4	14	33	6.475.800.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	4	11	21	1.167.262.857	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	5	15	28	4.507.941.431	DINAS PERTANIAN
30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	5	12	25	2.740.000.000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	2	2	4	2.550.000.000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	4	9	27	782.555.886	DINAS TRANSMIGRASI
33	SEKRETARIAT DAERAH	3	19	71	38.584.991.412	SEKRETARIAT DAERAH
34	SEKRETARIAT DAERAH	0	0	0	0	BAGIAN HUKUM DAN HAM
1	2	3	6	9	12	21
35	SEKRETARIAT DPRD	2	18	67	9.156.420.552	SEKRETARIAT DPRD
36	PERENCANAAN	3	12	38	4.247.546.572	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
37	KEUANGAN	4	15	75	11.427.466.694	BADAN KEUANGAN
38	KEPEGAWAIAN	1	4	14	757.501.024	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
39	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	2	7	15	607.498.306	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
40	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1	4	5	905.178.310	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
41	INSPEKTORAT DAERAH	3	11	35	4.108.932.019	INSPEKTORAT
42	KECAMATAN	3	11	25	401.220.540	KECAMATAN PANGALE
43	KECAMATAN	6	13	24	621.302.962	KECAMATAN TOPOYO
44	KECAMATAN	2	8	19	359.660.718	KECAMATAN TOBADAK
45	KECAMATAN	5	13	42	455.607.417	KECAMATAN KAROSSA
46	KECAMATAN	6	14	31	475.364.315	KECAMATAN BUDONG- BUDONG

47	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	3	7	12	557.667.200	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
----	-----------------------------	---	---	----	-------------	------------------------------------